

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Dalam melihat akuntabilitas politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi. Pertamaadanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan merupakan salah satu indikator dalam menilai bagaimana kesesuaian tersebut mengalami kesesuaian sesuai dengan apa yang di inginkan, tetapi ini merupakan suatu faktor yang membuat kesesuaian tersebut terkadang tidak semestinya terkadang SOP yang sudah dibuat dan masih ada yang menyalahi aturan tersebut, yang dimana pada penelitian ini peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian tadi. Pihak BPN Kota Jambi yang menjalankan SOP tadi tidak sesuai apa yang mereka berikan kepada masyarakat.

Selanjutnya yaitu adanya sistem pengawasan yang merupakan salah satu indikator dalam menilai bagaimana dalam fungsi pengawasan ini BPN kota jambi juga diawasi oleh kementerian ATR/BPN, DPR, sampai DPRD Provinsi/Kota dan juga Ombudsman yang dimana BPN Kota Jambi dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut belum terlihat.

Adanya sanksi yang di tetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Kecurangan atau bermainnya oknum di kantor BPN kota Jambi terdapat berupa sanksi atau teguran dari BPN Provinsi Jambi yang dalam hal ini juga merupakan proses akuntabilitas politik yang harus di jalankan dengan semestinya hal ini juga di kantor BPN kota Jambi ini banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang sengaja untuk mencari keuntungan pribadi salah satu

nya pungli atau pungutan liar yang di minta kepada masyarakat. Dan tindakan yang dilakukan yaitu dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku pelanggaran tersebut.

Terakhir yaitu adanya *output* dan *outcome* yang terukur Dengan cara membuat laporan bulanan dan tahunan selama kinerja pelayanan berjalan pada kesempatan ini Bentuk pelaporan sendiri itu di sampaikan ini terkait bentuk evaluasi dan berbagai temuan temuan yang ada di BPN Kota Jambi itu kepada DPRD kota dan DPRD Provinsi jambi. Dan hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena hal ini untuk mengetahui seberapa besar para birokrat yang memanfaatkan sebuah kepentingan pribadi dari jabatan serta kekuasaan yang dia miliki untuk mendapatkan sesuatu dan dalam suatu kekuasaan banyak pelanggaran yang di lakukan oleh instansi dan pejabat birokrat. Dengan adanya hal ini masyarakat bisa mengetahui apakah sebuah instansi badan pelayanan publik sudah benar-benar akuntabel didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak lagi dipolitisasi atau dirugikan dalam pelayanan. Dan meluasnya praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam kehidupan birokrasi publik semakin mencoreng citra masyarakat terhadap birokrasi publik. Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai, diatas menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan dan legitimasi pemerintah dan birokrasinya dimata publik. Ini semua terjadi karena pemerintah dan birokrasinya telah gagal menempatkan dirinya menjadi institusi yang bisa melindungi dan memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan publik. Praktik-

praktik KKN yang terjadi dalam kehidupan birokrasi telah membuat birokrasi semakin jauh dari masyarakatnya dan dominasi birokrasi dalam kehidupan politik.

## 6.2. Saran

Pertanggung jawaban yang diberikan BPN Kota Jambi haruslah jelas dan semuanya itu ada prosedur dan tindak lanjutnya didalam pengawasan juga nantinya hal tersebut dibahas dan menjadi sebuah kritikan dan masukan bagi BPN Kota Jambi. Dan juga keterlibatan lembaga dan masyarakat menjadi salah satu komponen penting dalam melakukan proses akuntabilitas politik ini.

Dibutuhkan pengawasan dan pemahaman didalam melaksanakan pelayanan dalam pembuatan sertifikat tanah ini baik dari lingkup kota dan provinsi sampai ke pusat. Dan kepingan publik harus didegarkan dan kritikan harus menjadi pecutan untuk BPN Kota Jambi sebagai badan pertanahan yang akuntabel. Dan dalam menjalankan akuntabilitas politik pihak BPN Kota jambi haruslah mementingkan kepedulian terhadap kepentingan publik yang dimana hal tersebut membuat BPN Kota Jambi terlihat menjalankan kinerjanya dengan baik.

